

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROSES  
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI DESA KUTUH  
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG, BALI**

**Anjelina Loru Gaura<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken Arok No. 12 Peguyangan, Denpasar, Bali 80115  
E-mail: jeligaura48@gmail.com

**Abstrak** - Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pariwisata sebagai sektor unggulan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi desa, namun dalam implementasinya kerap menghadapi tantangan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Kutuh meliputi pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa, penyuluhan dan pelatihan kepariwisataan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis budaya. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan informasi, kurangnya keterampilan masyarakat, dominasi pihak eksternal, dan alih fungsi lahan yang berdampak pada sektor pertanian.

**Kata Kunci:** pemberdayaan masyarakat, partisipasi, pariwisata, pembangunan

**Abstract** -Tourism is currently experiencing rapid growth. However, the development of a tourist area does not necessarily guarantee an increase in the welfare of the local community due to the still low level of public participation in tourism management. This study aims to examine community empowerment strategies in the planning and development process of tourism in Kutuh Village, South Kuta District, Badung Regency. As a leading sector, tourism contributes significantly to the village's economic growth, yet its implementation often faces challenges, particularly the suboptimal participation of the local community. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The informants in this study consist of village officials and local residents. The results show that community empowerment strategies in Kutuh Village include involving the community in village deliberation forums, tourism counseling and training, and the development of local economic potential based on culture. However, several obstacles remain, such as limited access to information, lack of community skills, the dominance of external parties, and the conversion of agricultural land which impacts the farming sector.

**Keywords:** Community empowerment, development, participation, tourism

**PENDAHULUAN**

Pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, merupakan proses perencanaan dan pembangunan bagian dari konsep community development

yang telah berkembang dan diterapkan sejak dekade 1960-an. Konsep ini mulai dikenal secara formal dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956–1960 yang dikenal sebagai Rencana Juanda, yang disusun oleh Biro Perancang Negara. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1954 telah menggunakan istilah *community development* sebagai pendekatan pembangunan yang memadukan berbagai teknik dan strategi dalam suatu program yang ditujukan bagi masyarakat setempat sebagai satu kesatuan tindakan. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya integrasi antara bantuan dari luar dengan keputusan serta upaya masyarakat yang terorganisasi, dengan tujuan utama mendorong tumbuhnya prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai motor perubahan yang sesungguhnya.

Dalam kajian pengembangan masyarakat, dikenal tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan menolong diri sendiri (*self-help*), pendekatan konflik, dan pendampingan teknik (*technical assistance*). Para pakar ilmu sosial lebih cenderung menggunakan istilah pengembangan masyarakat yang bersifat *bottom-up* dibandingkan dengan pembangunan masyarakat yang bersifat *top-down* dalam menerjemahkan konsep *community development*. Pengembangan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh dipahami sebagai aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan. Pembangunan yang berorientasi pada rakyat mensyaratkan terpenuhinya aspek keadilan, keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, serta adanya partisipasi aktif masyarakat Desa Kutuh.

Dalam konteks tersebut, pembangunan pariwisata di Desa Kutuh tidak dipahami sebagai proyek pemerintah yang bersifat hierarkis dan dipersembahkan kepada masyarakat dari atas ke bawah, melainkan sebagai suatu gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pembangunan pariwisata merupakan suatu proses perencanaan dan pembangunan di mana anggota masyarakat meningkatkan

kapasitas individu maupun kelembagaan dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan perbaikan kualitas hidup yang berkelanjutan dan merata, sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Kutuh pada hakikatnya merupakan suatu proses membantu individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mampu berkompetisi secara efektif dengan kelompok kepentingan lainnya. Proses tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan berbagai pendekatan, memanfaatkan media, terlibat dalam aksi politik, serta memperoleh pemahaman agar mampu bekerja secara sistematis dan terorganisasi. Menurut Sumardjo (2003), pemberdayaan masyarakat menjadikan potensi lokal sebagai ciri khas utama setiap wilayah. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat dapat dimulai dengan mengidentifikasi kekhasan bentang alam, perilaku, serta budaya masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, peningkatan kapasitas masyarakat akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan melalui penggalian dan pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki suatu daerah.

Namun demikian, permasalahan yang masih dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, adalah masih adanya keengganan sebagian masyarakat untuk diberdayakan dalam kehidupan komunitasnya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya butir 12, ditegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya.

Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat di Desa Kutuh yang dilakukan oleh pemerintah desa dinilai masih belum berjalan secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan I Nyoman Bharata (1981:122) yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kebijakan pembangunan dan kondisi sosial masyarakat.

Perilaku masyarakat dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Notoatmodjo, perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada aktivitas manusia dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor keturunan merupakan dasar perkembangan perilaku yang cenderung diwariskan antar generasi, sedangkan lingkungan menjadi ruang terjadinya proses pembelajaran (learning process) yang membentuk perilaku tersebut. Satwono menyatakan bahwa “perilaku adalah perbuatan manusia baik terbuka (overt behavior) maupun tidak terbuka (covert behavior)”.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, David (2004) menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses di mana seseorang menentukan apakah akan melakukan suatu tugas atau tidak, serta memilih cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan hambatan dengan sumber daya yang tersedia. Silalahi (2002) mendefinisikan perencanaan secara formal sebagai suatu proses penetapan tujuan (setting objectives) dan penentuan strategi serta taktik untuk mencapainya. Secara etimologis, perencanaan (planning) berasal dari kata plan yang berarti rencana atau rancangan, sehingga perencanaan dipahami sebagai suatu proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil dari proses tersebut.

Tujuan perencanaan pembangunan Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, meliputi: mengoordinasikan antar pelaku pembangunan desa; menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pembangunan daerah;

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan pembangunan Desa Kutuh menjadi pedoman dan ketentuan yang dijadikan acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara konsep pemberdayaan masyarakat yang diidealkan dengan implementasi perencanaan dan pembangunan pariwisata di tingkat desa, khususnya dalam hal partisipasi substantif masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk dilakukan penelitian yang secara mendalam mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh, agar pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti seperti menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sekumpulan kasus yang diambil atau dipilih dari Kumpulan atau populasi kasus yang lebih besar biasanya dengan tujuan memperkirakan karakteristik dari himpunan atau populasi yang lebih besar. Adapun menurut para ahli tentang sampel yaitu, Sugiono (2017:28)

"Sampel penelitian adalah jumlah dan karakteristik yang mewakili jumlah yang diselidiki oleh populasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan dari Pemerintah Desa Kutuh.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, pernyataan, atau uraian yang bersumber pada informasi dari pemerintah Desa Kutuh. Data kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2011) Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditentukan. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kombinasi atau triangulasi.

Menurut Sugiyono (2011) Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang dapat disajikan kepada orang lain. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, sedangkan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui deskripsi dan interpretasi. Teknik Penarikan Kesimpulan Menurut Sugiyono (2018:252) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dalam penelitian kesimpulan didapat melalui reduksi data, penyajian data secara verbal deskriptif dan akhirnya menganalisa makna dan arah yang muncul dari data tentang resistensinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.**

Strategi Pemberdayaan ini, diharapkan Desa Kutuh dapat mengembangkan pantai pandawa menjadi Destinasi wisata yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pendapat yang disampaikan oleh Bapak I Putu Gede Antara Selaku Kaur Perencanaan Desa Kutuh, Bahwa:

“Proses perencanaan di Desa Kutuh mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku selama 8 tahun. Perencanaan tahunan disusun melalui musyawarah desa dengan menggali aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian ditetapkan sebagai prioritas melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa). Skala prioritas yang telah ditetapkan selanjutnya dituangkan ke dalam program kegiatan untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.”(Wawancara, 30 April 2025). Dari Pendapat yang disampaikan oleh Bapak I Putu Gede Antara Selaku Kaur Desa Kutuh Perencanaan, dapat disimpulkan bahwa Proses perencanaan di Desa Kutuh dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan mengacu pada RPJM Desa sebagai pedoman jangka menengah dan RKP Desa sebagai acuan tahunan yang disusun berdasarkan aspirasi dan skala prioritas masyarakat.

Ada juga yang disampaikan oleh Bapak I Kadek Agus Sudiantara selaku Sekretaris Desa Kutuh bahwa:

“Strategi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh mencakup partisipasi aktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan lokal, penciptaan kemandirian ekonomi serta pelestarian budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemberdayaan ini menjadi kunci utama dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan yang inklusif dan adil, dimana masyarakat lokal menjadi pelaku utama dan penerima manfaat dari kegiatan pariwisata tersebut.” (Wawancara, 30 April 2025). Dari pendapat yang di sampaikan oleh Bapak I Kade Agus Sudiantara selaku Sekretaris Desa Kutuh dapat disimpulkan bahwa, Strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Kutuh bertujuan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, dengan menekankan partisipasi aktif, peningkatan kapasitas, dan pelestarian budaya serta lingkungan, sehingga masyarakat lokal menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pembangunan pariwisata.

Dampak strategi pengembangan pariwisata terhadap kelestarian lingkungan dan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

**Dampak dari Strategi pemberdayaan masyarakat wisata terhadap kelestarian lingkungan sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.**

Pengelolaan yang diterapkan di Desa Kutuh telah menunjukkan hasil positif dalam hal konservasi alam, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbaru dan manajemen sumber daya air. Namun, perhatian terusmenerus dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi potensi dampak negatif. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak I Putu Gede Antara Selaku Kaur Perencanaan Desa Kutuh, Bahwa:

“Kami telah menerapkan pengelolaan sampah di desa maupun di kawasan pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap pengunjung maupun lingkungan agar dapat terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Pengelolaan tersebut mencakup pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan tempat sampah di berbagai titik strategis, serta pengangkutan sampah secara rutin bekerja sama dengan pihak pengelola kebersihan desa. Selain itu, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan mendukung program zero waste. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif serta menciptakan citra destinasi wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.” (Wawancara, 30 April 2025).

Dari pendapat yang di sampaikan oleh Bapak I Putu Gede Antara Selaku Kaur Perencanaan Desa Kutuh dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan sampah yang diterapkan di desa dan kawasan pariwisata bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pengunjung dan lingkungan, sehingga tercipta suasana yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua pihak.

**Hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh kecamatan kuta selatan kabupaten badung**

Pembangunan pariwisata di suatu daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Meski sektor ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial, dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala yang menghambat kelancaran perencanaan dan pelaksanaannya. Hambatan tersebut bisa berasal dari kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, konflik kepentingan, hingga dampak lingkungan yang belum tertangani. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan tersebut agar pengembangan pariwisata dapat berjalan

lebih efektif, berkelanjutan, dan menguntungkan seluruh pihak Seperti yang di sampaikan oleh Bapak I Putu Gede Antara Selaku Kaur Perencanaan Desa Kutuh, Bahwa:

“Dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh, kami menghadapi beberapa hambatan yang cukup signifikan. Pertama, tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata. Ada sebagian warga yang sangat aktif, tapi banyak juga yang kurang paham atau merasa tidak dilibatkan karena keterbatasan informasi dan komunikasi dari pihak pengelola.” (Wawancara, 30 April 2025).

Dari pendapat yang di sampaikan oleh Bapak I Putu Gede Antara Selaku Kaur Perencanaan Desa Kutuh dapat disimpulkan bahwa, Dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemerataan partisipasi masyarakat. Meskipun ada warga yang aktif terlibat, masih banyak yang merasa kurang dilibatkan akibat minimnya informasi dan komunikasi dari pihak pengelola. Ada juga yang disampaikan oleh Bapak I Kadek Agus Sudiantara selaku Sekretaris Desa Kutuh bahwa:

“salah satu hambatan utama dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat cenderung menyerahkan urusan pengembangan pariwisata kepada pemerintah desa atau investor, tanpa memahami bahwa partisipasi aktif mereka sangat dibutuhkan agar program- program pariwisata dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. (Wawancara, 30 April 2025).

Dari pendapat yang di sampaikan oleh Bapak I Kadek Agus Sudiantara selaku Sekretaris Desa Kutuh dapat disimpulkan bahwa, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata. Masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya urusan pengembangan pariwisata kepada

pemerintah desa atau investor. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif menyebabkan pembangunan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga menghambat terciptanya program pariwisata yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam setiap prosesnya. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, karena melalui keterlibatan aktif masyarakat, program-program pariwisata menjadi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berakar kuat pada potensi serta nilai-nilai lokal.

Namun demikian, dalam praktiknya, salah satu hambatan utama yang sering muncul adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata. Masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya urusan pengembangan pariwisata kepada pemerintah desa, aparat pengelola, atau bahkan investor. Mereka kurang menyadari bahwa keterlibatan mereka sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya peran mereka, minimnya akses terhadap informasi dan pendidikan, serta tidak tersedianya ruang partisipatif yang terbuka. Hal ini diperkuat oleh pendapat Arnstein (1969) dalam teorinya *Ladder of Citizen Participation*, yang menyebutkan bahwa partisipasi sejati tidak hanya tentang kehadiran masyarakat, tetapi tentang pemberdayaan dan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Cohen dan Uphoff (2011) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perumusan perencanaan, pelaksanaan

kegiatan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Apabila partisipasi ini tidak dibangun dengan baik sejak tahap awal, maka proses pembangunan berisiko tidak mencerminkan kepentingan masyarakat dan berujung pada resistensi sosial atau ketimpangan manfaat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif, yang tidak hanya mengundang masyarakat untuk hadir, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam proses dialog, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003), hambatan atau kendala adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu, memperlambat, atau bahkan menggagalkan pencapaian tujuan suatu kegiatan atau organisasi. Hambatan bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal dan dapat bersifat teknis, struktural, maupun kultural.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh telah dilakukan melalui berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal. Pemerintah desa bersama pemangku kepentingan terkait telah mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk membangun kesadaran, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan rasa memiliki terhadap proses pembangunan pariwisata yang berlangsung di Desa Kutuh. Strategi pengembangan pariwisata yang diterapkan di Desa Kutuh telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata telah membuka berbagai peluang usaha dan lapangan kerja baru, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor informal dan jasa pariwisata. Namun demikian, efektivitas pemberdayaan masyarakat masih belum merata. Masyarakat yang memiliki akses dan pengetahuan

cenderung lebih dominan dalam memperoleh manfaat ekonomi, sementara sebagian lainnya masih belum terlibat secara aktif akibat keterbatasan informasi, kapasitas, atau sarana. Di sisi lain, strategi pengembangan pariwisata juga membawa dampak terhadap kelestarian lingkungan. Beberapa kawasan hijau dan lahan produktif telah mengalami alih fungsi menjadi area komersial seperti vila, restoran, dan tempat parkir. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata di Desa Kutuh masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam pengembangan pariwisata. Banyak warga masih menganggap bahwa pembangunan pariwisata sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah desa atau pihak investor. Selain itu, kurangnya komunikasi dan distribusi informasi dari pihak pengelola kepada masyarakat juga menjadi penghalang dalam membangun partisipasi yang inklusif. Tidak semua lapisan masyarakat memperoleh akses yang memadai terhadap informasi terkait perencanaan dan kegiatan pembangunan pariwisata. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak merasa dilibatkan dan enggan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah desa bersama pihak pengelola pariwisata perlu secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran aktif mereka dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata. Sosialisasi ini harus dilakukan secara merata, menjangkau seluruh kelompok masyarakat agar tidak ada yang merasa terpinggirkan. Pemerintah desa bersama stakeholder pariwisata perlu merancang dan menerapkan strategi pembangunan pariwisata yang berprinsip pada keberlanjutan (*sustainable tourism*). Ini mencakup perlindungan kawasan hijau, konservasi sumber daya alam, dan

pengendalian pembangunan fisik agar tidak merusak tata ruang dan ekosistem lokal. Serta diperlukan penguatan regulasi di tingkat desa mengenai pemanfaatan lahan dan zonasi pembangunan, agar kawasan produktif dan ruang terbuka hijau tidak terus mengalami alih fungsi menjadi area komersial. Penegakan aturan yang tegas akan membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pemberdayaan masyarakat, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang merata kepada seluruh warga, terutama terkait program pariwisata. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta membangun kesadaran kolektif bahwa pariwisata merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah juga diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan dan menyediakan sistem insentif bagi warga yang aktif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Buku :

- Michael Huberman, dan Matthew B. Miles, Analisis Data Kualitatif Terj.Tjejep Rohid, 2014, (Jakarta: UI Press Abidin,Y.Z.2015)
- Adisasmita, R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- AL RIZQI, S. D. (2019). Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmadja, I. B., & Pageh, I. W. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Singaraja: Undiksha Press.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2005). *Tourism: Principles and Practice* (3rd ed.). Pearson Education.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and Practice* (4th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (2011). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. In *Participation and Development in the Third World*. Princeton University Press.
- David, F. R. (2003). *Strategic Management: Concepts and Cases* (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- David, F. R. (2004). *Manajemen Strategis: Konsep*. Jakarta: Prenhallindo.
- Haeruman, H. S. (1997). *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafiah, A. M. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Hikmat, Hary. 2006. *Strategi Pemberdayaan*.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Marketing Management*. Pearson Prentice Hall.
- Kunarjo, (1993). *Pembiayaan Jakarta: Perencanaan dan Pembangunan*. Penerbit Indonesia. Universitas
- Kurniawan, H. (2016). Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Berbasis Lingkungan. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 6(2), 55–64.
- Listiyangsih, T. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.



- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mowforth, M., & Munt, I. (2009). *Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World*. Routledge.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and Practice*. Harlow: Pearson Education.
- Riyadi, S. (2005). *Perilaku Organisasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silalahi, U. (2002). *Administrasi Publik: Suatu Pendekatan Teori dan Konsep*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sjamsuddin, H. (1996). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: REST.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Masyarakat. Bandung: Humaniora Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, I. (2007). *Ilmu Administrasi Publik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syafri, H. (2011). *Pengantar Administrasi Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2008). *Tourism and Development in the Developing World*. Routledge.
- Traigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*.
- Uno, H. B. (2006). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UNWTO. (2013). *Sustainable Tourism for Development Guidebook*.
- UNWTO. (2013). *Sustainable Tourism for Development: Guidebook*. Madrid: World Tourism Organization.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability (13th ed.)*. Pearson Education.
- Wiana, I. W. (2009). *Membangun Karakter Bangsa melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- WWF Indonesia. (2014). *Ecotourism Development for Environmental and Community Sustainability*. Jakarta: WWF.
- Yoeti, O. A. (2008). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Jurnal:
- Adn, A. F., & Adnan, M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Wisata Digital Di Desa Kandri Kota Semarang Tahun 2017-2019*. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 91-100.
- Hidayatullah, F. A., & Suminar, T. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*. *Lifelong Education Journal*, 1(1), 1-11.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). *Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi*

Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo).  
Publika, 365-380.

Wahyuni, D. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 9(1), 83-100.

Undang-Undang:

Undang-Undang No 06 tahun 2014 Tentang  
Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomer: 72 tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.